

PENGARUH BOS PADA PENGELUARAN PENDIDIKAN SISWA TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN GIANYAR

I Wayan Juliana Yoga Anggara Putra¹
I Wayan Sukadana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Email: anggarayoga866@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengidentifikasi permasalahan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan untuk mengetahui pengaruh BOS terhadap pengeluaran pendidikan siswa tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Gianyar yaitu sebanyak 295 sekolah dasar pada tahun 2020. Jumlah sampel dihitung dengan rumus slovin maka didapatkan jumlah sampel pada sekolah dasar (SD) di kabupaten Gianyar yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 sampel. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari Analisis Deskriptif dan Analisis Manova (Multivariate Analysis of Variance). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam masalah teknis yang terjadi dalam dana BOS pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar yaitu adanya penggunaan dana bos kadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, Dana Bos datangnya tidak tepat waktu dan pelaporannya harus segera selesai serta terlalu banyak ada perubahan, Penyusunan RKAS yang harus sesuai dengan ambang batas harga yang sudah ditentukan. Hasil uji Multivariate Analysis of Variance (Manova) menunjukkan keempat nilai p-value pada kategori lokasi sekolah memperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka disimpulkan bahwa adanya perbedaan pengeluaran pendidikan berdasarkan lokasi pada level kepercayaan 95% antara pengaruh Program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terhadap pengeluaran pendidikan berlandaskan kategori lokasi sekolah dan status sekolah.

Kata Kunci: Program BOS, pengeluaran pendidikan, Sekolah Dasar, Gianyar

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify problems with BOS funds (School Operational Assistance) and to determine the effect of BOS on education expenditures for elementary school students in Gianyar Regency. The population in this study is the number of elementary schools (SD) in Gianyar Regency, which is 295 elementary schools in 2020. The number of samples is calculated by the Slovin formula, so the number of samples in elementary schools (SD) in Gianyar Regency that will be taken in this study is as much as 75 samples. The data analysis technique used consisted of descriptive analysis and multivariate analysis of variance. The results of the analysis show that there are various kinds of technical problems that occur in the BOS funds at the elementary school level in Gianyar Regency, namely the use of boss funds sometimes not in accordance with school needs, Boss funds arriving on time and reporting must be completed immediately and there are too many changes, Preparation of RKAS which must be in accordance with a predetermined price threshold. The results of the Multivariate Analysis of Variance (Manova) test show that the four p-values in the school location category have a significance value of $0.000 < 0.05$, it is concluded that there is a difference in educational expenditure based on location at the 95% confidence level between the effect of the BOS (Operational Assistance) program Schools) to education expenditures based on the category of school location and school status.

Keywords: BOS Program, education expenditure, Elementary School, Gianyar

PENDAHULUAN

Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS mulai dilaksanakan pada Juli 2005 yang diberikan kepada sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat sebagai akibat adanya kenaikan harga BBM Program BOS ini memiliki perbedaan dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) pada bidang pendidikan sebelumnya, dimana program tersebut adalah program yang berbentuk beasiswa (Bantuan Khusus Murid/BKM) kepada siswa yang dianggap miskin. Sedangkan, BOS adalah program diberikan kepada sekolah (Indahri, 2019). Pengalokasian besaran yang dana BOS didasarkan dengan jumlah murid, dengan perhitungan, untuk siswa tingkat SD diberikan sebesar Rp 235.000 per siswa per tahun dan Rp 324.500 per siswa per tahun untuk tingkat SMP. Untuk periode Juli sampai Desember 2005 alokasi APBN untuk dana BOS meningkat sekitar 8 (delapan) kali lipat dibanding anggaran BKM untuk SD dan SMP periode Januari-Juni 2005 yaitu sebesar Rp. 5,136 triliun (Smeru, 2006).

Dana BOS bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu untuk meringankan beban bagi siswa dan menurunkan keterbatasan akses terhadap pendidikan dasar yang diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang tertuang pada UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, pada prinsipnya Program BOS dicanangkan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses

pendidikan yang berkualitas dan mampu untuk mengentaskan wajib belajar Sembilan tahun (Kharisma. 2013).

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan (Pratomo, 2017). Pendidikan memerlukan perhatian khusus karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi juga kualitas tenaga kerja. Infrastruktur dan fasilitas pendidikan tidak memadai yang mengakibatkan sejumlah besar orang buta huruf dan tidak terampil (Jamaliah & Said, 2017). Apabila semua tenaga kerja berkualitas terlibat aktif dalam perekonomian, akan meningkatkan output barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Seran, 2017). Banyak yang menyebabkan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia khususnya di Provinsi Bali. Perbedaan dalam pembangunan daerah di antara provinsi-provinsi Indonesia mempengaruhi masalah pendidikan (Yuni, 2015).

Pembangunan pendidikan mulai dari SD (Sekolah Dasar). Berdasar pada amanat Undang-undang Dasar 1945, maka pengertian pendidikan di sekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7 sampai dengan 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi siswa. Disinilah siswa sekolah dasar ditempa

berbagaibidang studi yang kesemuanya harus mampu dikuasai siswa. Tidaklah salah bila di sekolah dasar disebut sebagai pusat pendidikan. bukan hanya di kelas saja proses pembelajaran itu terjadi akan tetapi di luar kelas pun juga termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran (Wiriana, 2020).

Menurut Lubis (2014) pengeluaran pemerintah atas pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan di Indonesia masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hafidh (2011) mengatakan dana pemerintah yang dianggarkan untuk pendidikan belum terserap maksimal dan belum dikelola dengan kemampuan manajerial yang cukup baik oleh pemerintah daerah, hal ini terbukti terbukti dengan ditemukannya kasus-kasus korupsi dana pendidikan Indonesia. Maka dari itu dana yang di keluarkan pemerintah belum mencapai katagori maksimal dalam hal penggunaan dana yang direalisasi pemerintah.

Salah satu solusi program yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemendikbud ialah sebagai berikut, kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah di prioritaskan pada peningkatan akses bagi anak terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar. Pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. (Depdiknas&Depag, 2007:3) Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, maka sejak bulan juli 2005, pemerintah meluncurkan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Seluruh calon peserta didik dan yang sudah bersekolah berhak mendapatkan dana BOS dan sekolah

yang sudah sesuai dengan syarat dari kemendigbud, mulai dari terdaftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan memiliki izin operasional aktif bagi sekolah swasta.

Seluruh Sekolah Dasar (SD) di kabupaten Gianyar yang terdaftar di Dinas Pendidikan kabupaten Gianyar yang sudah terdaftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mendapatkan subsidi BOS. Sehingga para siswa tidak perlu lagi menanggung biaya operasional sekolah dan akan menurunkan pengeluaran pendidikan bagi siswa. Di kabupaten Gianyar ada beberapa sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa yang bervariasi. Dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah yang ditentukan oleh jumlah siswa yang terdaftar/sedang menempuh pendidikan di sekolah maka jumlah dari bantuan dana BOS setiap Sekolah Dasar di kabupaten Gianyar berbeda-beda dari satu sekolah dengan yang lainnya.

Program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dapat menurunkan pengeluaran pendidikan karena program yang dikeluarkan pemerintah ini menanggung seluruh biaya operasional non personalia sekolah yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Maka dengan ditanggungnya biaya operasional tersebut akan menurunkan pengeluaran pendidikan yang ditanggung sebelumnya oleh siswa dan akan meningkatkan minat siswa yang sebelumnya terkendala biaya untuk bersekolah kembali. Penurunan pengeluaran pendidikan terjadi karena beberapa biaya operasional telah disubsidi oleh program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat orang tua siswa di bidang pendidikan (Anggraini, 2001). Program dana BOS sangat penting ada di tengah biaya pendidikan siswa yang perekonomiannya di bawah garis kemiskinan, agar

mereka semua bisa mengenyam pendidikan yang bermutu sesuai dengan program pemerintah wajib belajar sembilan tahun. Dana BOS akan meringankan mulai dari sekolah yang gratis dengan tidak ada punggutan biaya sekolah. Dengan adanya program dana BOS yang di luncurkan oleh pemerintah, pengeluaran dibidang pendidikan bagi orang tua siswa menjadi lebih murah dan sedikit mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya beiringan dengan inflasi. Pentingnya investasi pada sumberdaya manusia (SDM) maka pemerintah meluncurkan suatu program yang menunjang pendidikan adalah salah satu investasi dibidang sumber daya manusia dengan pendidikan gratis. Bukan hanya pemerintah seluruh *stakeholders* perlu berperan secara patisipasif terutama masyarakat dan swasta.

Layanan pendidikan dan kesehatan merupakan barang publik yang harusnya disediakan oleh pemerintah secara gratis. Pendidikan (*formal*) merupakan cara cepat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (Seran, 2017). Makin tinggi pendidikan makin tinggi kualitas tenaga kerja yang dihasilkan De Silva & Sumarto (2014). Maka dari itu pemerintah harus bisa pemeratakan program pendidikan sampai ke daerah terpencil dengan gratis dengan demikikian penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mendapatkan mutu pendidikan yang lebih baik secara gratis. Pemerintah mencanangkan program BOS (Biaya Operasional Sekolah) sebagai jembatan menuju pendidikan gratis.

Tabel 1.
Penggunaan Dana BOS Tingkat Sekolah Dasar Menurut Laporan Triwulan
1 April 2019

NO	Penggunaan Anggaran BOS tingkat SD	Persen
1	Pengelolaan Sekolah	22,1%
2	EkstraKulikuler Siswa	19,5%
3	Pembayaran Guru/Pegawai Honorer	18,4%
4	Evaluasi Pembelajaran	13,1%
5	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana	8,7%
6	Langganan Daya dan Jasa Sekolah	6,2%
7	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidik	5,5%
8	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	3,4%
9	Pengembangan Perpustakaan	2,6%
10	Biaya Lainnya	0,2%
11	Penerimaan Siswa Baru	0,2%
Jumlah		100%

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Tabel 1 menunjukkan penggunaan dana BOS yang di keluarkan oleh pemerintah untuk sekolah dasar (SD) yang harus disusun sedemikian agar tidak melenceng dari anggaran dan program yang telah dicanangkan. Biaya tersebut akan disepakati oleh kepala sekolah dan komite sekolah yang berbentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebelum diajukan ke Kemendikbud.

Prinsip-prinsip pegunaan dana BOS tertuang dalam pasal 6 Permen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 80 tahun 2015 yaitu efektif, efisien, transparan, akuntabel, kepatuhan dan manfaat. Dalam penggunaan dana BOS jika semua prinsip dijalankan dengan baik maka implementasi terhadap pengelolaan pengeluaran pemerintah, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat dibandingkan dengan sebelum adakannya program BOS, banyak anak-anak di bawah garis kemiskinan yang putus sekolah. Dengan beberapa biaya pendidikan yang akan mampu disubsidi oleh program dana BOS maka akan dapat meminimalkan pengeluaran pendidikan bahkan tidak akan memunggut sepeserpun biaya dari siswa yang sedang menempuh pendidikan. Ada beberapa biaya yang disubsidi oleh BOS diantaranya: disebutkan pada Tabel 1 Sasaran

BOS Reguler yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdadata dalam dapodik. Waktu penyaluran dana BOS reguler dilakukan setiap triwulan. Bagi wilayah dengan jangkauan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS reguler dilakukan setiap semester (bos.kemendikbud.go.id).

Program dana BOS mengalami kendala dalam penyaluran ke sekolah-sekolah yang tidak terjangkau koneksi dengan baik mulai dari akses jalan menuju sekolah maupun jaringan internet misalnya, seperti daerah pegunungan, pulau terpencil dan sekolah-sekolah yang termasuk pelosok hutan sehingga dalam pendaftaran data untuk memperoleh bantuan dana BOS untuk sekolah secara gratis. Dari keterlambatan bantuan operasional sekolah ke sekolah-sekolah yang terpelosok mengakibatkan para murid dan orang tua siswa memilih untuk meninggalkan desa dan sekolah kemudian mereka bersekolah di perkotaan atau daerah yang mudah terjangkaunya pendidikan yang lebih bermutu dan gratis. Masih banyak juga penyelewengan bantuan operasional sekolah (korupsi), masalah dalam pelaporan yang kurang sesuai dengan pemakaian dan pemakaian yang belum efektif sesuai dengan Juknis (Petunjuk teknis) BOS sesuai dengan isi Permendikbud.

Oleh karena masih ada masalah di BOS maka berdampak pada performance sekolah yang ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah siswa di sekolah dasar yang ada di daerah pedesaan yang ada di kabupaten Gianyar, karena kurangnya fasilitas sarana prasarana sekolah yang ada di pedesaan di Kabupaten Gianyar. Maka banyak juga orang tua siswa yang akan mengeluarkan biaya untuk meningkatkan mutu pendidikan anak mereka mulai dari sekolah dasar, sehingga

mereka mengurangi konsumsi untuk barang yang lainnya (Jones & Hagul, 2014). Dengan demikian maka mereka fokus pada pendidikan anak-anak mereka yang akan meneruskan mereka dikemudian hari untuk membuat keluarga mereka lebih sejahtera. Dengan meningkatkan mutu pendidikan maka akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mendapatkan upah yang banyak sehingga mampu mencukupi keluarganya yang sebelumnya kekurangan.

Masalah-masalah teknis yang terjadi dalam pengelolaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yaitu seperti; Sekolah SD dan SMP rata-rata tidak memiliki tenaga administrasi sehingga pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran, guru SD dan SMP rata-rata tidak memiliki pengetahuan mengenai akuntansi ataupun perpajakan secara spesifik sehingga sekolah akan menunjukan guru atau staf tata usaha yang tidak berkopeten dalam hal pengelolaan dana BOS. Sedangkan dalam pengelolaan dana BOS membutuhkan tenaga ahli dikarenakan dana yang dikelola cukup besar dan menyangkut kepentingan orang banyak (Syamsir, 2018).

Kabupaten Gianyar yang terdiri dari 7 kecamatan yang memiliki 295 sekolah dasar yang tercatat semuanya mendapat subsidi biaya pendidikan yaitu BOS (Biaya Operasional Sekolah) (Suryadarma, 2012). Kecamatan yang terlihat beberapa situasi lapangan belum memiliki fasilitas sarana prasarana belajar dengan baik terutama yang ada di pedesaan yaitu Payangan dan Tegallalang. Maka dari itu orang tua siswa yang memiliki penghasilan di atas rata-rata akan mendorong anaknya agar bersekolah ke daerah perkotaan agar mendapat fasilitas sarana prasarana belajar yang baik dan mutu pendidikan yang lebih baik. Lokasi sekolah juga akan menjadi sebuah pertimbangan orang tua siswa. Penelitian ini

akan meneliti pengeluaran pendidikan mulai dari seragam sekolah, sepatu sekolah, buku tulis, ekstrakurikuler, buku panduan pembelajaran dan 8 standar yang harus dijalankan oleh sekolah dengan perbedaan sebelum ada program BOS dan sesudah ada Program BOS dengan berdasarkan lokasi dan status sekolah.

Tabel 2.

Jumlah Sekolah Dasar Per Kecamatan Di Kabupaten Gianyar Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah SD (Sekolah Dasar)
1	Blahbatuh	39
2	Gianyar	56
3	Payangan	32
4	Sukawati	61
5	Tampaksiring	30
6	Tegallalang	31
7	Ubud	46
Jumlah		295

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, 2020

Tabel 2 menunjukkan 295 sekolah dasar (SD) yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Gianyar, dengan 276 sekolah dasar Negeri dan 19 sekolah dasar swasta yang terdaftar di dapodik (Data Pokok Pendidikan) di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. di Kec. Gianyar terdapat 3 sekolah dasar swasta, di Kec. Blahbatuh terdapat 2 sekolah dasar swasta, di Kec. Sukawati terdapat 8 sekolah dasar swasta, di Kec. Ubud terdapat 5 sekolah dasar swasta, di Kec. Tegallalang terdapat 1 sekolah dasar swasta.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di lakukan di Kabupaten Gianyar, dipilihnya lokasi penelitian ini karena masih tingginya pengeluaran untuk biaya pendidikan sedangkan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) berusaha untuk tidak memunggut biaya sepeserpun dari orang tua siswa khususnya di Kabupaten Gianyar.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Gianyar yaitu sebanyak 295 sekolah dasar pada tahun 2020. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan Rumus Slovin sebagai

berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- n = jumlah anggota sampel
- N= jumlah anggota populasi
- e = nilai kritis (batas ketelitian 10%)

$$n = \frac{295}{1 + 295 (0,1)^2} = \frac{295}{3,95}$$

n = 74,6835(dibulatkan menjadi 75)

Berdasarkan dengan rumus slovin maka didapatkan jumlah sampel pada sekolah dasar (SD) di kabupaten Gianyar yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 sampel.

Uji manova dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan kemampuan antara dua kelas sampel yaitu pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan sebelum adanya Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan sesudah adanya BOS. Pengujian dilakukan sebanyak dua kali pada hasil pretes dan post-tes dengan menggunakan Uji *Hotelling's Trace*.

$$T^2 = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2} D^2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

T 2 adalah Hottelings Trace

N1 adalah banyak sampel pada kelompok 1

N2 adalah banyak sampel pada kelompok 2

D 2 = $(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)' s^{-1} (\bar{y}_1 - \bar{y}_2)$ di mana $\bar{y}_1 - \bar{y}_2$ adalah selisih mean vektor sampel dan s-1 adalah invers matriks kovariansi

Setelah memperoleh nilai T2 Hottelling's, selanjutnya ditransformasikan untuk memperoleh nilai distribusi F dengan formula sebagai berikut:

$$F = \left(\frac{n_1+n_2-p-1}{p} \right) \left(\frac{T^2}{n_1+n_2-2} \right) \dots\dots\dots(3)$$

Dengan p adalah banyaknya variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika

$$F_{hit} \geq F_{\alpha}(p: n_1 + n_2 - p - 1 \dots\dots\dots(4)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif adalah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum data yang telah dikumpulkan dari responden. Distribusi responden dimaksudkan untuk melihat faktor pengeluaran pendidikan sebelum dan sesudah adanya program subsidi BOS. Tabel 4.27 memperlihatkan hasil analisis statistik deskriptif yang terdiri dari jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata dan standar deviasi.

Tabel 3.
Statistik Deskriptif

	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Jumlah Unit Pengeluaran Sebelum	75	21.00	33.00	28.4800	2.73792
Jumlah Unit Pengeluaran Sesudah	75	10.00	25.00	20.9467	2.72076

Sumber: Data dioah, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai N sebanyak 75 yang berarti terdapat sebanyak 75 Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar yang digunakan sebagai sampel penelitian. Jumlah unit pengeluaran sebelum subsidi memiliki nilai minimum sebesar 21 persen yang berarti bahwa sebelum diberikan subsidi BOS Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar memiliki pengeluaran pendidikan sebanyak 21 persen. Kemudian jumlah unit pengeluaran sesudah subsidi BOS memiliki nilai minimum sebesar 10 persen yang berarti bahwa sesudah diberikan subsidi BOS, maka pengeluaran pendidikan pada Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar menjadi

berkurang sebanyak 11 persen dan hanya memiliki pengeluaran pendidikan sebanyak 10 persen.

Jumlah unit pengeluaran sebelum subsidi memiliki nilai maksimum sebesar 33 persen yang berarti bahwa sebelum diberikan subsidi BOS Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar memiliki pengeluaran pendidikan sebanyak 33 persen. Kemudian jumlah unit pengeluaran sesudah subsidi BOS memiliki nilai maksimum sebesar 25 persen yang berarti bahwa sesudah diberikan subsidi BOS, maka pengeluaran pendidikan pada Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar menjadi berkurang sebanyak 8 persen dan hanya memiliki pengeluaran pendidikan sebanyak 25 persen.

Nilai standar deviasi pada jumlah unit pengeluaran sebelum diberikan subsidi BOS adalah sebesar 2,73 dengan nilai rata-rata sebesar 28,48 persen. Kemudian nilai standar deviasi pada jumlah unit pengeluaran sesudah diberikan subsidi BOS adalah sebesar 2,72 dengan nilai rata-rata sebesar 20,95 persen.

Uji Manova dalam penelitian ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dependen pengaruh BOS terhadap pengeluaran pendidikan siswa tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar.

Tabel 4.
Multivariate Tests

<i>Effect</i>		<i>Value</i>	<i>F</i>	<i>Hypothesis</i> <i>df</i>	<i>Error df</i>	<i>Sig.</i>
Intercept	Pillai's Trace	.999	8347.430 ^a	7.000	51.000	.000
	Wilks' Lambda	.001	8347.430 ^a	7.000	51.000	.000
	Hotelling's Trace	1145.726	8347.430 ^a	7.000	51.000	.000
	Roy's Largest Root	1145.726	8347.430 ^a	7.000	51.000	.000
Lokasi	Pillai's Trace	2.526	2.682	84.000	399.000	.000
	Wilks' Lambda	.016	3.667	84.000	320.351	.000
	Hotelling's Trace	8.128	4.769	84.000	345.000	.000
	Roy's Largest Root	3.574	16.974 ^b	12.000	57.000	.000
Status	Pillai's Trace	.236	2.251 ^a	7.000	51.000	.045
	Wilks' Lambda	.764	2.251 ^a	7.000	51.000	.045
	Hotelling's Trace	.309	2.251 ^a	7.000	51.000	.045
	Roy's Largest Root	.309	2.251 ^a	7.000	51.000	.045
Lokasi *	Pillai's Trace	.854	2.093	28.000	216.000	.002
Status	Wilks' Lambda	.339	2.313	28.000	185.305	.001
	Hotelling's Trace	1.409	2.491	28.000	198.000	.000
	Roy's Largest Root	.863	6.659 ^b	7.000	54.000	.000

a. Exact statistic

b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

c. Design: Intercept + Lokasi + Status + Lokasi * Status

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen (Program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada semua variabel dependen (pengeluaran pendidikan) dari kategori lokasi sekolah dan status sekolah. Uji multivariate digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata Seragam Sekolah, Sepatu Sekolah, Buku Tulis, Ektrakurikuler, Buku Panduan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa dan 8 Standar pengeluaran sebelumnya untuk setiap kategori lokasi sekolah dan status sekolah. Keputusan dianalisis dengan Pillai Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy's dan F test. Hasil semua test setiap kategori lokasi sekolah dan status sekolah signifikan pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel sebelumnya berbeda untuk tiap-tiap kategori yang dijelaskan sebagai berikut:

Hasil uji multivariat ini menunjukkan keempat nilai p-value pada kategori lokasi sekolah memperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada level kepercayaan 95% antara pengaruh

Program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terhadap pengeluaran pendidikan berlandaskan kategori lokasi sekolah dan status sekolah.

Hasil uji multivariat ini menunjukkan keempat nilai p-value pada kategori status sekolah memperoleh nilai signifikansi $0,045 < 0,05$, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada level kepercayaan 95% antara pengaruh Program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terhadap pengeluaran pendidikan berlandaskan kategori status sekolah.

Hasil uji *levene's test of equity of error variances* dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5.
Levene's Test of Equity Of Error Variances

	F	df1	df2	Sig.
Seragam Sekolah	5.797	17	57	.000
Sepatu Sekolah	3.072	17	57	.001
Buku Tulis	8.767	17	57	.000
Ektrakurikuler	2.274	17	57	.011
Buku Panduan Pembelajaran	6.673	17	57	.000
Lembar Kerja Siswa	5.360	17	57	.000
8 Standar pengeluaran yang di subsidi	9.765	17	57	.000

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Lokasi + Status + Lokasi * Status

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil Levene's test digunakan untuk menguji varian tiap-tiap variabel dependen sama atau tidak (asumsi Manova). Untuk variabel seragam sekolah, Sepatu Sekolah, Buku Tulis, Ektrakurikuler, Buku Panduan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa dan 8 Standar pengeluaran memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 yang berarti ada perbedaan pengeluaran di setiap lokasi maupun kategori status sekolah yang berbeda.

Tabel 6.
Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Lokasi	Seragam Sekolah	.851	12	.071	1.023	.441
	Sepatu Sekolah	18.510	12	1.542	3.914	.000
	Buku Tulis	6.156	12	.513	4.393	.000
	Ektrakurikuler	63.182	12	5.265	2.226	.022
	Buku Panduan Pembelajaran	.377	12	.031	1.155	.337
	Lembar Kerja Siswa	1.374	12	.115	1.031	.435
	8 Standar pengeluaran yang di subsidi	8.276	12	.690	13.633	.000
Status	Seragam Sekolah	.012	1	.012	.170	.682
	Sepatu Sekolah	.809	1	.809	2.053	.157
	Buku Tulis	.295	1	.295	2.523	.118
	Ektrakurikuler	.022	1	.022	.009	.924
	Buku Panduan Pembelajaran	.000	1	.000	.000	1.000
	Lembar Kerja Siswa	.000	1	.000	.000	1.000
	8 Standar pengeluaran yang di subsidi	.577	1	.577	11.415	.001

Sumber: Data diolah, 2021

Oleh Karena F hitung pada kategori lokasi sekolah sebesar 1,023 dengan nilai signifikansi $0,441 > 0,05$ maka dikatakan bahwa H_0 diterima yaitu Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran seragam sekolah,pada seluruh lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar. Sedangkan nilai F hitung pada kategori status sekolah sebesar 0,170 dengan nilai signifikansi $0,682 > 0,05$ maka dikatakan bahwa H_0 diterima yaitu Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran seragam sekolah,pada seluruh status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar.

Oleh Karena F hitung pada kategori lokasi sekolah sebesar 3,914 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dikatakan bahwa H_1 diterima yaitu Program dana BOS berpengaruh terhadap pengeluaran sepatu sekolah,pada seluruh lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar. Sedangkan nilai F hitung pada kategori status sekolah sebesar 2,053 dengan nilai signifikansi sebesar $0,157 > 0,05$ maka dikatakan bahwa H_0 diterima yaitu Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap

pengeluaran sepatu sekolah,pada seluruh status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar.

Oleh Karena F hitung pada kategori lokasi sekolah sebesar 4,393 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dikatakan bahwa H_1 diterima yaitu Program dana BOS berpengaruh terhadap pengeluaran buku tulis,pada seluruh lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar. Sedangkan nilai F hitung pada kategori status sekolah sebesar 2,523 dengan nilai signifikansi sebesar $0,118 > 0,05$ maka dikatakan bahwa H_0 diterima yaitu Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran buku tulis,pada seluruh status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar.

Oleh Karena F hitung pada kategori lokasi sekolah sebesar 2,226 dengan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$ maka dikatakan bahwa H_1 diterima yaitu Program dana BOS berpengaruh terhadap pengeluaran ekstrakurikuler,pada seluruh lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar. Sedangkan nilai F hitung pada kategori status sekolah sebesar 0,009 dengan nilai signifikansi sebesar $0,924 > 0,05$ maka dikatakan bahwa H_0 diterima yaitu Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran ekstrakurikuler,pada seluruh status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar.

Oleh Karena F hitung pada kategori lokasi sekolah sebesar 1,155 dengan nilai signifikansi $0,337 > 0,05$ maka dikatakan bahwa H_0 diterima yaitu Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran buku panduan pembelajaran,pada seluruh lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar. Sedangkan nilai F hitung pada kategori status sekolah sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi $1,000 > 0,05$ maka dikatakan bahwa H_0 diterima yaitu Program dana

BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran buku panduan pembelajaran, pada seluruh status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar.

Oleh Karena F hitung pada kategori lokasi sekolah sebesar 1,031 dengan nilai signifikansi $0,435 > 0,05$ maka dikatakan bahwa H_0 diterima yaitu Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran lembar kerja siswa, pada seluruh lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar. Sedangkan nilai F hitung pada kategori status sekolah sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi $1,000 > 0,05$ maka dikatakan bahwa H_0 diterima yaitu Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran lembar kerja siswa, pada seluruh status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar.

Berlandaskan pada hasil penyebaran kuesioner pada 75 sampel Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar terdapat 48 sekolah yang menyatakan tidak ada permasalahan teknis yang terjadi dalam dana BOS, sedangkan sisanya sebanyak 27 sekolah menyatakan ada permasalahan tentang dana BOS, dimana menurut SD Negeri 1 Gianyar yang berdiri sejak tahun 1920 dan SD Negeri 2 Blahbatuh yang berdiri tahun 1940 menyatakan bahwa permasalahan tentang BOS yaitu pada peraturan Penggunaan/Alokasi dana BOS yang sering berubah-ubah dan tidak sesuai dengan kondisi sekolah.

Tabel 7.
Katagori Permasalahan yang terjadi dalam Program BOS

NO	Jenis Permasalahan	Permasalahan BOS
1	Teknis	Adanya penggunaan dana bos kadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah Dana Bos datangnya tidak tepat waktu dan pelaporannya harus segera selesai serta terlalu banyak ada perubahan
2	Peraturan	Sering ada pengeluaran yang tidak terduga dalam pelaksanaannya Penggunaan anggaran dana BOS menggunakan peraturan pusat dan berpatokan pada sekolah-sekolah di kota, sehingga tidak sesuai dengan kepentingan sekolah di desa dan perlu di sesuaikan dengan sekolah yang letaknya di desa Sering terjadi perbaharuan dalam pengelolaan dana BOS tiap tahunnya dan peraturan Penggunaan/Alokasi dana BOS sering Berubah-ubah tidak sesuai dengan Kondisi sekolah.
3	SDM (Sumber Daya Manusia)	Tidak adanya petugas/ bendahara yang khusus sehingga segala yang berurusan dengan Bos di kerjakan guru

Sumber: Data diolah, 2021

Menurut I Ketut Garim, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 3 Mas yakni

“Ada penggunaan dana bos kadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah”. Kemudian menurut 4 sekolah yang ada di Gianyar yakni SD Negeri 4 Gianyar, SD Negeri 5 Gianyar, SD Negeri 6 Gianyar, dan SD Negeri 7 Gianyar menyatakan bahwa “Dana Bos datangnya tidak tepat waktu dan pelaporannya harus segera selesai serta terlalu banyak ada perubahan”.

Permasalahan tentang BOS yang lain disampaikan oleh Kepala Sekolah SD

Saraswati yakni I Nyoman Intaran, S.Pd yang menyatakan :

“Penyusunan RKAS yang harus sesuai dengan ambang batas harga yang sudah ditentukan”

Beberapa sekolah juga menyampaikan bahwa permasalahan tentang BOS yang terjadi terdiri dari adanya keterlambatan pembayaran, lalu masuk ke siplah ribet, RKAS ribet,dan harga di siplah tidak sesuai dengan di lapangan. Sedangkan menurut Ibu Ni Wayan Suci, S.Pd.SD selaku kepala sekolah SD Negeri 5 Mas menyatakan bahwa:

“Ada permasalahan teknis yang terjadi dalam dana BOS, kita menggunakan data tunggal dari sekolah di bagian verifikasi masih ada yang salah hingga terjadi retur ulang data”

Selain itu, Bapak I Ketut Suliana, S.Pd dan I Nyoman Sulatra, S.Pd menyatakan bahwa:

“Penggunaan dana Bos dengan yang sudah dibuat pada RKAS kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.”

Faktor lain permasalahan teknis yang terjadi dalam dana BOS menurut Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar antara lain:

- 1) Pencairan dana datangnya terlambat dari juknis yang disampaikan dan sekolah sangat membutuhkan dana secepatnya.
- 2) Sering ada pengeluaran yang tidak terduga dalam pelaksanaannya.
- 3) Masalah sering terjadi perubahan penggunaan dana serta perubahan pembuatan RKAS .
- 4) Tidak adanya petugas/bendahara yang khusus sehingga segala yang berurusan dengan Bos di kerjakan guru
- 5) Penggunaan anggaran dana BOS menggunakan peraturan pusat dan berpatokan pada sekolah-sekolah di kota, sehingga tidak sesuai dengan kepentingan sekolah di desa dan perlu di sesuaikan dengan sekolah yang letaknya di desa
- 6) Sering terjadi perbaharuan dalam pengelolaan dana BOS tiap tahunnya
- 7) Peraturan Penggunaan/Alokasi dana BOS sering Berubah-ubah tidak sesuai dengan Kondisi sekolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen (Program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada semua variabel dependen (pengeluaran pendidikan) dari kategori lokasi sekolah dan status sekolah. Uji multivariate digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata Seragam Sekolah, Sepatu Sekolah, Buku Tulis, Ektrakurikuler, Buku Panduan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa dan 8 Standar pengeluaran sebelumnya untuk setiap kategori lokasi sekolah dan status sekolah.

Keputusan dianalisis dengan Pillai Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy's dan F test. Hasil semua test setiap kategori lokasi sekolah dan status sekolah signifikan pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel Seragam Sekolah, Sepatu Sekolah, Buku Tulis, Ektrakurikuler, Buku Panduan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa dan 8 Standar pengeluaran sebelumnya berbeda untuk tiap-tiap kategori lokasi sekolah dan status sekolah, dengan demikian maka Hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Selanjutnya apabila ditinjau pada pengaruh program dana bos terhadap seluruh variabel pengeluaran pendidikan (Seragam Sekolah, Sepatu Sekolah, Buku Tulis, Ektrakurikuler, Buku Panduan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa dan 8 Standar pengeluaran) untuk setiap kategori lokasi sekolah dan status sekolah diketahui bahwa:

1. Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran seragam sekolah pada seluruh lokasi dan status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar
2. Program dana BOS berpengaruh terhadap pengeluaran sepatu sekolah pada seluruh lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar, namun tidak berpengaruh pada kategori status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar
3. Program dana BOS berpengaruh terhadap pengeluaran buku tulis pada seluruh lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar, namun tidak berpengaruh pada kategori status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar
4. Program dana BOS berpengaruh terhadap pengeluaran ekstrakurikuler pada seluruh lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar, namun tidak berpengaruh pada kategori status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar

5. Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran buku panduan pembelajaran pada seluruh lokasi dan status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar
6. Program dana BOS tidak berpengaruh terhadap pengeluaran lembar kerja siswa pada seluruh lokasi dan status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar
7. Program dana BOS berpengaruh terhadap 8 standar pengeluaran yang di subsidi, pada seluruh lokasi dan status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar

Hasil menunjukkan secara parsial tidak seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan, namun hasil uji serempak pada multivariate test menunjukkan di setiap kategori lokasi dan status sekolah memiliki nilai signifikansi F yang kurang dari 0,05, sehingga secara menyeluruh disimpulkan ada pengaruh yang signifikan dari Program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terhadap pengeluaran pendidikan berdasarkan kategori lokasi sekolah dan status sekolah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Guhardja dkk (1993) dan Tjiptoherijanto dan Soemitro (1998) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, kemudian pengeluaran rumah tangga terhadap pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu pengaruh adanya Biaya Operasional Sekolah (BOS) terhadap pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan ialah bisa memangkas biaya pendidikan yang terlalu tinggi, dengan pemerintah memberikan subsidi biaya pendidikan melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk mencapai sekolah gratis yang mampu mengangkat rumah tangga di bawah garis

kemiskinan untuk mengenyam mutu pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka biaya yang di keluarkan rumah tangga untuk pendidikan menjadi menurun, jika biaya pendidikan menurun maka akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia begitu juga sebaliknya.

Jadi dengan adanya bantuan dana BOS pada siswa tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar, maka sarana dan prasaran sekolah dapat bertambah, sehingga mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga dapat tercipta lulusan yang berkualitas. Oleh Karena F hitung pada kategori lokasi sekolah sebesar 13,633 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dikatakan bahwa H_1 diterima yaitu Program dana BOS berpengaruh terhadap 8 standar pengeluaran yang di subsidi, pada seluruh lokasi Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar. Sedangkan nilai F hitung pada kategori status sekolah sebesar 11,415 dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka dikatakan bahwa H_1 diterima yaitu Program dana BOS berpengaruh terhadap 8 standar pengeluaran yang di subsidi, pada seluruh status Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar.

SIMPULAN

Permasalahan teknis yang terjadi dalam dana BOS pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar yaitu adanya penggunaan dana bos kadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, Dana Bos datangnya tidak tepat waktu dan pelaporannya harus segera selesai serta terlalu banyak ada perubahan, Penyusunan RKAS yang harus sesuai dengan ambang batas harga yang sudah ditentukan, pihak sekolah harus menggunakan data tunggal dari sekolah di bagian verifikasi

masih ada yang salah hingga terjadi retur ulang data, Penggunaan dana Bos dengan yang sudah dibuat pada RKAS kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, Pencairan dana datangnya terlambat dari juknis yang disampaikan dan sekolah sangat membutuhkan dana secepatnya, Sering ada pengeluaran yang tidak terduga dalam pelaksanaannya, Masalah sering terjadi perubahan penggunaan dana serta perubahan pembuatan RKAS, dan permasalahan SDM (Sumber Daya Manusia): Tidak adanya petugas/ bendahara yang khusus sehingga segala yang berurusan dengan Bos di kerjakan guru. Permasalahan Peraturan dalam Program BOS: Penggunaan anggaran dana BOS menggunakan peraturan pusat dan berpatokan pada sekolah-sekolah di kota, sehingga tidak sesuai dengan kepentingan sekolah di desa dan perlu di sesuaikan dengan sekolah yang letaknya di desa, lalu sering terjadi perbaharuan dalam pengelolaan dana BOS tiap tahunnya dan peraturan Penggunaan/Alokasi dana BOS sering Berubah-ubah tidak sesuai dengan Kondisi sekolah.

Hipotesis diterima yaitu Program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan siswa tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Gianyar berlandaskan dari kategori lokasi sekolah dan status sekolah, hal ini karena semua test setiap kategori lokasi sekolah dan status sekolah signifikan pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel Seragam Sekolah, Sepatu Sekolah, Buku Tulis, Ektrakurikuler, Buku Panduan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa dan 8 Standar pengeluaran sebelumnya berbeda untuk tiap-tiap kategori lokasi sekolah dan status sekolah. Dengan demikian maka biaya yang di keluarkan rumah tangga untuk pendidikan menjadi menurun, jika biaya pendidikan menurun maka akan mendorong masyarakat

untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia begitu juga sebaliknya.

Sebaiknya pemerintah menambahkan jumlah alokasi dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas sekolah, dan jika pemerintah benar-benar ingin membebaskan pendidikan dari biaya maka sekiranya pemerintah memberikan subsidi pendidikan BOS dengan jumlah lebih besar dan tepat waktu, agar sudah tidak ada sekolah yang memungut pungutan biaya dana dari siswa/orangtua siswa (Maulana, 2020). Dan dalam mengatasi program dana BOS pemerintah hendaknya langsung turun kelapangan untuk melihat hal-hal yang menghambat pelaksanaan program BOS mulai dari permasalahan teknis, peraturan dan SDM (Sumber Daya Manusia).

Semua pihak sekolah harus saling kerjasama dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif (tersedianya fasilitas pembelajaran yang lengkap, kualitas guru yang baik, lingkungan belajar yang nyaman dan bersih), sehingga dengan keberadaan semua faktor tersebut diharapkan siswa lebih fokus belajar serta termotivasi untuk berprestasi. Hal yang sudah baik untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menjadi percontohan untuk sekolah-sekolah lain penerima dana BOS.

REFERENSI

- Anggraini, R. D. (2001). Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Sumber*, 21(23), 21-77.
- Budhi, M. K. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 6. No. 1
- De Silva, I., & Sumarto, S. (2014). Does economic growth really benefit the poor? Income distribution dynamics and pro-poor growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 227-242.
- Hafidh, A.A. (2011) Analisis Hubungan Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menggunakan Kausalitas Granger. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 8, Nomor 2, Hal. 124-141
- Harmadi, S. H. B. (2005). Pendidikan Publik, Interaksi Antar Daerah, Dan Kesejahteraan Sosial1.
- Indahri, Y. (2019). Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 10(1), 49-60.
- Jamaliah, J., & Said, M. (2017). The effect of Employment Development Index on economic growth and poverty level in Indonesia. *Problems and perspectives in management*, (15, Iss. 2 (cont. 2)), 364-371.
- Jones, G. W., & Hagul, P. (2001). Schooling in Indonesia: Crisis-related and longer-term issues. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(2), 207-231.
- Kharisma, B. (2013). Dampak program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap tingkat putus sekolah di Indonesia: Analisis DID. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 44297.
- Lubis, C. A. B. E. (2014). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja Dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Economia*, 10(2), 187-193.
- Maulana, Rizky. Apakah Pendidikan Tinggi Meningkatkan Kemungkinan untuk Bekerja di Sektor Formal? *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], p. 133-144, feb. 2020. ISSN 2303-0186.
- Pratomo, D. S. (2017). Pendidikan dan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia: Analisis Terhadap Hipotesis Kurva-U. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 14-22.

- Seran, S. (2017). Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1), 59.
- Smeru.(2006). *Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005*. Jakarta
- Supriadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryadarma, D. (2012). How corruption diminishes the effectiveness of public spending on education in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(1), 85-100.
- Syamsir, S. (2018), Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap (*Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Makassar)
- Tjiptoherijanto, Prijono., Soemitro, Sutyastie. 1998. *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta :PT. Cita Putra Bangsa.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional. Jakarta: *Kementerian Pendidikan Nasional*.
- Wiriana, Kartika. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2012-2018. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, [S.L.], V. 9, N. 5, P. 1051 – 108.
- Yuni, A. (2015). *Socio-Economic Factor on Indonesia Education Disparity*. *Jurnal International Education Studies*, vol.8, No. 1.